

## PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: STUDI KASUS DI DESA POLEONRO

Andi Jumriani Trisdah<sup>1</sup>, Abd. Hafid<sup>2</sup>, Muhammad Abdi Buhasyim<sup>3</sup>

[andijumriantrisdah25@gmail.com](mailto:andijumriantrisdah25@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdhafidizza@gmail.com](mailto:abdhafidizza@gmail.com)<sup>2</sup>, [abdibuhasyim07@gmail.com](mailto:abdibuhasyim07@gmail.com)<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri Bone

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat :Studi Kasus Di Desa Poleonro untuk mengetahui Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Poleonro. Untuk mengetahui Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Poleonro. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Di mana data yang dikumpulkan berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari perilaku orang yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) cukup membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti bahan makanan pokok dan pendidikan anak. Beberapa keluarga mampu mengelola dana dengan bijak, baik untuk pendidikan maupun sebagai modal usaha kecil. Namun, keterbatasan jumlah bantuan dan cakupan penerima yang belum menyeluruh membuat dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang, seperti perbaikan rumah atau peningkatan ekonomi keluarga secara menyeluruh. Bantuan lebih berfungsi sebagai penopang stabilitas konsumsi daripada mendorong perubahan pola makan atau kualitas gizi. Dampaknya terhadap motivasi anak bersekolah pun bervariasi. Selain itu, sistem komunikasi PKH belum merata dan efektif, sehingga sebagian penerima mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi. Secara umum, meskipun bantuan PKH dirasakan bermanfaat, terutama untuk pendidikan, namun belum mampu membawa perubahan ekonomi yang berarti bagi keluarga penerima.

**Kata Kunci:** Peran Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dengan banyak aspek. Ini kompleks karena kemiskinan bukan hanya masalah kemiskinan itu sendiri, tetapi juga bagaimana hal itu memengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Menurut Islam, kemiskinan tidak hanya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga perilaku buruk yang menyebabkan miskin, seperti malas untuk bekerja dan berusaha.

Produksi dapat dipengaruhi oleh kualitas hidup yang buruk bagi penduduk miskin. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan beban keuntungan bagi masyarakat meningkat. Mereka yang memiliki pendapatan rendah, tidak memiliki pendapatan tetap, atau tidak memiliki pendapat sama sekali dianggap berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, masyarakat miskin diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup mereka sebagai hasil dari upaya berbagai pihak untuk mengatasi dan menangkali kemiskinan.

Kartasasmita mengatakan bahwa ada tiga garis kebijakan yang dapat digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Yang pertama adalah kebijakan tidak langsung yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap upaya penanggulangan kemiskinan akan berlangsung. Yang kedua adalah kebijakan langsung yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah; dan yang ketiga adalah kebijakan khusus yang bertujuan untuk

mempersiapkan masyarakat miskin dan aparat yang bertanggung jawab langsung atas penanggulangan kemiskinan.

Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat pesan konstitusi yang menyatakan bahwa usaha untuk mengatasi kemiskinan adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, memperkaya kehidupan berbangsa, dan berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada kebebasan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Konstitusi yang menekankan kesejahteraan rakyat tersebut kemudian menghasilkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K ini merupakan lembaga yang berada langsung dibawah pengawasan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas).<sup>2</sup>

Pemerintah harus merancang dan menjalankan program untuk membantu orang dan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Langkah-langkah intervensi melalui program pemerintah harus intensif dan didukung anggaran yang cukup untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu cara strategis adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu, dengan fokus pada akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial lainnya. Diharapkan program ini dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu secara.

PKH merupakan sebuah inisiatif sosial yang memberikan bantuan dengan syarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Inisiatif ini memberikan uang tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan untuk mendorong perubahan perilaku menuju kondisi sosial yang lebih baik. Setiap anggota keluarga dalam RTSM yang terdaftar wajib memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, seperti menjamin anak-anak menerima pendidikan dan wanita hamil menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup dan pemutusan rantai kemiskinan antar generasi.<sup>4</sup>

PKH bertujuan untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan mereka untuk memperbaiki pengeluaran rumah tangga. Sasaran utama PKH adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan memutus siklus kemiskinan yang berlangsung antar - generasi, meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta merubah perilaku keluarga yang kurang mampu yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam jangka pendek, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, sedangkan dalam jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima manfaat untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan memperbaiki gizi, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar-generasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian pada Peran Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Poleonro.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Di mana data yang dikumpulkan berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari perilaku orang yang diamati.

Pendekatan kualitatif ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui

Peran Program Keluarga Harapan di Desa Poleonro.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Poleonro**

Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada semua warga negaranya, terutama kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Pekerjaan rumah tangga (PKH) adalah bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang melalui pemenuhan kebutuhan dasar mereka seperti akses terhadap layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial umum. Selain itu, program ini digunakan oleh pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan dengan mendorong penerima bantuan untuk berubah menjadi lebih mandiri dan produktif.

Di Desa Poleonro, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, ada 85 keluarga yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial mewajibkan mereka untuk berpartisipasi dalam program ini. Keluarga-keluarga ini terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan dikategorikan sebagai miskin atau rentan miskin. Mereka juga memiliki anggota keluarga yang masuk dalam kelompok prioritas seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, orang tua, atau penyandang disabilitas berat (DTKS).

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Poleonro, peneliti menetapkan 8 responden sebagai sampel penelitian dari total 85 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemilihan responden dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan variasi kondisi sosial-ekonomi serta situasi keluarga masing-masing. Adapun karakteristik kedelapan responden tersebut meliputi:

- a. Ibu rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah,
- b. Keluarga yang merawat anggota dengan disabilitas berat,
- c. Lansia yang menerima bantuan sosial,
- d. Keluarga dengan usaha kecil mandiri (UMKM),
- e. Penerima PKH yang juga aktif dalam kegiatan kewirausahaan.

Pemilihan 85 keluarga sebagai penerima manfaat PKH sebelumnya telah melalui proses verifikasi oleh aparat desa dan pendamping PKH, guna memastikan bahwa mereka tergolong dalam kategori keluarga prasejahtera. Selain itu, mereka juga memenuhi kriteria sebagai peserta program, terutama berkaitan dengan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan.

Dalam praktiknya, jumlah bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat PKH sangat bergantung pada jumlah anggota keluarga, terutama anak-anak, dan tingkat pendidikan mereka. Dari hasil wawancara mendalam, diketahui bahwa salah satu responden menerima bantuan sejumlah Rp200.000 setiap tiga bulan untuk satu anak sekolah dasar. Responden lain yang memiliki dua anak usia sekolah menerima bantuan kurang lebih sebesar Rp500.000. Bahkan terdapat responden dengan empat anak sekolah yang menerima total bantuan mendekati Rp1.000.000 per tiga bulan. Selain itu, keluarga dengan tiga anak namun berbeda tingkat Pendidikan Mendapatkan bantuan sekitar Rp500.000, karena besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing anak.

Melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, ditemukan bahwa program PKH memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan taraf hidup para responden. Untuk lebih jelasnya tabel berikut merupakan 8 responden yang diambil sebagai sampel dari 85 Keluarga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

**Daftar Keluarga Penerima Manfaat**

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	Jumlah
1.	Suhaeda	Jampu	IRT	1
2.	Suniawati	Jampu	IRT	3
3.	Sumartini	Jampu	IRT	3
4.	Hastuti	Bulo	IRT	2
5.	Subaedah	Jampu	IRT	3
6.	Masriani	Jampu	IRT	4
7.	Martati	Jampu	IRT	3
8.	Sutriani	Jampu	IRT	3

a. Pemenuhan Pangan

(PKH) memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari keluarga penerima manfaat. Salah satu informan menyampaikan bahwa dana bantuan yang diterima setiap periode digunakan secara bijak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.<sup>37</sup>

Sebagian dari dana tersebut dialokasikan demi kebutuhan perlengkapan sekolah anak, seperti seragam, sepatu, dan alat tulis.

Sebagian besar dana lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur harian, terutama bahan pokok seperti minyak goreng, telur, beras, dan mi instan. Bahan-bahan tersebut menjadi makanan pokok yang dikonsumsi hampir setiap hari.

Dari responden yang kami temui, menyatakan bahwa 100% pola konsumsi makanan keluarga tetap sama seperti sebelum menerima bantuan.<sup>38</sup> Tidak terjadi penambahan jenis makanan yang lebih bervariasi, seperti buah, sayuran segar, daging, atau sumber protein lainnya yang bernilai gizi tinggi. Pola konsumsi makanan lebih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan pendapatan rumah tangga. Ketika penghasilan mencukupi, keluarga dapat membeli makanan yang lebih baik, namun saat penghasilan menurun, keluarga hanya mengandalkan bahan makanan pokok yang ada. Dengan demikian, bantuan PKH berfungsi sebagai penopang agar kebutuhan pokok terpenuhi, namun belum mampu mendorong peningkatan kualitas asupan gizi keluarga.

Pengakuan serupa juga disampaikan oleh informan lain, yang menegaskan bahwa bantuan PKH berguna untuk menutupi kebutuhan harian, namun dari segi makanan tidak ada perubahan yang signifikan. Jenis makanan yang dikonsumsi tetap sama seperti sebelumnya, tergantung sepenuhnya pada penghasilan keluarga.<sup>39</sup>

Jika pendapatan rendah, maka menu makanan sederhana dan berulang seperti nasi dengan lauk telur atau mi instan menjadi pilihan utama. Terkadang keluarga juga mengandalkan bantuan sembako dari desa atau lingkungan sekitar ketika mengalami kesulitan ekonomi.

Dari kedua keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH lebih berfungsi sebagai penyangga kestabilan konsumsi dasar keluarga prasejahtera daripada sebagai alat untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Masyarakat penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti beras dan lauk sederhana, namun belum mampu mengakses makanan yang lebih bergizi dan variatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial belum sepenuhnya menyentuh dimensi ketahanan pangan secara menyeluruh. Bantuan sosial cenderung berperan sebagai alat bantu bertahan hidup daripada sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara bantuan sosial dengan program pendampingan lain seperti edukasi gizi, pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi agar keluarga tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat meningkatkan taraf hidup secara mandiri.

#### b. Kebutuhan Pendidikan

Bantuan dari (PKH) diharapkan memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam membantu meringankan beban kebutuhan pendidikan bagi keluarga penerima manfaat. Dari responden yang kami temui menyatakan 100% Dana yang diperoleh dari program ini dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak, terutama dalam bentuk pembelian perlengkapan sekolah seperti seragam, alat tulis, tas, dan sepatu. Selain itu, sebagian dana juga digunakan untuk kebutuhan pendukung lainnya seperti uang saku harian dan biaya transportasi menuju sekolah.<sup>40</sup>

Bagi sebagian keluarga, bantuan tersebut menjadi sangat penting karena tanpa adanya PKH, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak. Bantuan tersebut memberikan rasa lega dan keamanan, karena kebutuhan sekolah anak bisa terpenuhi tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok lainnya. Dalam beberapa kasus, bantuan PKH bahkan menjadi satu-satunya sumber dana yang dipakai untuk membayar pendidikan anak, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Dampak bantuan PKH terhadap semangat belajar anak pun menunjukkan dinamika yang beragam. Di satu sisi dari responden yang temui terdapat 50% anak yang menunjukkan peningkatan motivasi untuk bersekolah setelah menerima bantuan.<sup>41</sup> Mereka merasa lebih percaya diri karena bisa memakai perlengkapan sekolah yang layak seperti teman-temannya. Perasaan tidak malu karena memiliki seragam baru atau perlengkapan belajar yang cukup memberi dorongan psikologis positif. Bantuan PKH secara tidak langsung membantu anak merasa lebih setara dengan teman sebayanya dan mendorong mereka untuk lebih rajin hadir di sekolah.

Namun demikian, tidak semua anak menunjukkan peningkatan semangat belajar meskipun kebutuhan sekolah telah dibantu oleh program PKH. Dari responden yang kami temui menyatakan 50% bahwa beberapa keluarga tetap ditemukan anak-anak yang enggan bersekolah atau memiliki tingkat kehadiran yang rendah.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa bantuan secara finansial saja tidak selalu cukup untuk memotivasi anak agar giat dalam pendidikan.

Dengan demikian, bahwa bantuan PKH memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak seperti, Dari sisi material, program ini terbukti membantu keluarga miskin untuk menyediakan perlengkapan dan kebutuhan dasar pendidikan, sehingga mengurangi angka putus sekolah akibat kendala ekonomi. Namun, dari sisi motivasi dan semangat belajar, dampaknya tidak bersifat universal. Ada sebagian anak yang merespon positif terhadap bantuan tersebut, namun ada pula yang tidak menunjukkan perubahan perilaku dalam hal kedisiplinan atau kehadiran di sekolah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan bantuan finansial. Perlu adanya dukungan non-material yang sifatnya mendampingi, seperti perhatian orang tua, bimbingan belajar, dan lingkungan sosial yang mendukung anak untuk terus bersekolah dan belajar. Peran pendamping PKH dan pihak sekolah menjadi penting dalam mendorong kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan serta membentuk pola pikir anak agar lebih menghargai proses belajar.

Untuk memaksimalkan dampak program PKH terhadap sektor pendidikan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan integratif. Pemerintah tidak hanya perlu menyalurkan bantuan secara rutin, tetapi juga memperkuat sinergi antara bantuan sosial dengan program pemberdayaan keluarga, penyuluhan pendidikan, serta pelatihan orang tua dalam membina dan memotivasi anak. Dengan pendekatan tersebut, bantuan PKH tidak hanya akan meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga mendorong tumbuhnya generasi yang lebih berdaya, terdidik, dan memiliki semangat belajar yang tinggi.

#### c. Kebutuhan Kesehatan

Pada aspek kebutuhan kesehatan, para penerima manfaat (PKH), khususnya yang memiliki anak balita, umumnya mengikuti anjuran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di posyandu. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan satu kali dalam sebulan dan menjadi bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan PKH, terutama untuk mendukung kesehatan anak-anak mereka. Posyandu menjadi sarana utama dalam pemantauan tumbuh kembang balita, di mana anak-anak mendapatkan layanan dasar seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta pemberian vitamin dan obat cacing secara berkala.

Dari Responden yang kami temui menyatakan bahwa 88% dari mereka yang memang memiliki balita secara rutin membawa balita mereka ke posyandu setiap bulan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak kader kesehatan.<sup>43</sup> Mereka menyadari bahwa keikutsertaan dalam kegiatan posyandu merupakan syarat dalam pelaksanaan program PKH yang harus dipatuhi, dan hal tersebut juga dinilai bermanfaat bagi pemantauan kesehatan anak. Responden juga mengungkapkan bahwa selama mengikuti kegiatan di posyandu, anak-anak mereka mendapat pelayanan yang cukup memadai, termasuk pemeriksaan kesehatan ringan, pemberian vitamin A, imunisasi, serta obat cacing yang diberikan secara berkala.<sup>44</sup>

Namun demikian, terdapat 12% responden yang tidak secara konsisten mengikuti kegiatan posyandu setiap bulan. Alasan utama yang dikemukakan oleh para responden adalah kondisi kesehatan balita yang sedang kurang baik, seperti demam atau mengalami sakit ringan, sehingga orang tua memilih untuk tidak membawanya ke posyandu agar tidak memperburuk kondisi anak atau menularkan penyakit ke anak lainnya.<sup>45</sup> Selain itu, terdapat juga kekhawatiran dari orang tua bahwa membawa anak yang sedang sakit ke tempat umum seperti posyandu justru dapat membuat kondisi anak semakin memburuk.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penerima bantuan PKH rutin membawa balitanya ke posyandu setiap bulan sebagai bentuk kepatuhan terhadap program dan untuk memantau tumbuh kembang anak. Namun, sebagian kecil tidak konsisten hadir karena balita sedang sakit atau kurang sehat. Secara umum, kegiatan posyandu dinilai bermanfaat, meskipun masih diperlukan edukasi dan dukungan layanan kesehatan lanjutan agar pelaksanaan program lebih optimal.

#### d. Kebutuhan Tempat Tinggal

Pada aspek perbaikan tempat tinggal bantuan Program Keluarga Harapan tidak menjadi prioritas utama bagi sebagian besar penerima manfaat. Hal ini terlihat dari temuan di lapangan yang menyatakan bahwa 75% responden lebih mengutamakan penggunaan dana PKH untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan pangan sehari-hari. Namun demikian, dalam beberapa kasus, terdapat penerima manfaat yang menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk keperluan perbaikan rumah, terutama jika secara kebetulan terdapat bagian rumah yang rusak atau memerlukan pembenahan mendesak. Penggunaan bantuan untuk perbaikan rumah biasanya bersifat insidental, dan bukan tujuan utama dari pemanfaatan bantuan yang diterima.

Beberapa responden mengungkapkan bahwa meskipun jumlah bantuan PKH tidak besar, mereka tetap menyisihkan sebagian kecil untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak.<sup>46</sup>

Keputusan untuk melakukan perbaikan rumah ini biasanya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan saat itu, dan hanya dilakukan jika tidak mengganggu alokasi dana untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti biaya sekolah anak dan pembelian kebutuhan dapur. Dalam hal ini, penggunaan bantuan PKH bersifat fleksibel, tergantung pada kondisi rumah tangga masing-masing.

Di sisi lain, terdapat pula responden yang menyatakan bahwa dana bantuan PKH tidak digunakan untuk keperluan perbaikan rumah karena tidak memiliki rumah pribadi. Responden tersebut tinggal bersama mertua.<sup>47</sup> Sehingga seluruh bantuan PKH difokuskan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka dan membeli kebutuhan pokok rumah tangga. Alasan tinggal bersama mertua ini juga berkaitan dengan kondisi ekonomi yang belum memungkinkan mereka untuk memiliki tempat tinggal sendiri.

Selain itu, ditemukan pula bahwa di antara penerima manfaat yang telah memiliki rumah sendiri, mayoritas tidak menggunakan dana PKH untuk keperluan perbaikan rumah. Mereka mengungkapkan bahwa bantuan PKH yang diterima lebih difokuskan untuk membiayai pendidikan anak dan mencukupi kebutuhan dapur.<sup>48</sup> Alokasi dana sepenuhnya diarahkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak dan menjadi prioritas keluarga. Dengan keterbatasan jumlah bantuan yang diterima, mereka merasa tidak memungkinkan untuk membagi dana tersebut ke kebutuhan lain di luar pendidikan dan konsumsi harian.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis penggunaan bantuan PKH bersifat fleksibel, para penerima tetap menjadikan pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai prioritas utama. Perbaikan tempat tinggal hanya menjadi alternatif sekunder dan dilakukan jika kondisi rumah benar-benar memerlukan penanganan segera, serta jika ada sisa dana setelah kebutuhan utama terpenuhi.

#### e. Kesejahteraan Ekonomi

Dari sisi segi kesejahteraan ekonomi, responden yang kami temui menyatakan 100% keluarga penerima manfaat (PKH) belum merasakan perubahan yang signifikan.<sup>49</sup> Hal ini disebabkan oleh pola pencairan bantuan yang tidak dilakukan setiap bulan, melainkan hanya dalam satu kali pencairan setiap beberapa bulan. Akibatnya, keluarga tidak dapat mengandalkan bantuan PKH secara rutin sebagai sumber penghasilan bulanan. Beberapa responden menyampaikan bahwa apabila bantuan PKH diterima setiap bulan secara rutin, kemungkinan besar akan lebih terasa dampaknya dalam mendukung kestabilan ekonomi rumah tangga, meskipun jumlahnya tetap terbatas. Meskipun demikian, para penerima manfaat tetap merasa bersyukur karena Dengan bantuan ini, mereka dapat sedikit meringankan pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan dapur dan pendidikan anak.

Meskipun belum memberi dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, bantuan PKH dalam beberapa kasus justru digunakan secara produktif. Salah satu contoh yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketika sebagian dana bantuan PKH dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha kecil. Beberapa responden menceritakan bahwa saat suami mereka kekurangan modal untuk berjualan sayur, dana bantuan PKH yang kebetulan baru dicairkan digunakan untuk membantu kelangsungan usaha tersebut.<sup>50</sup> Bantuan itu tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga diarahkan sebagai dana darurat yang dapat digunakan kapan saja untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain itu, sebagian penerima manfaat (PKH) menyisihkan sebagian dana bantuan yang diterima untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha, khususnya usaha sembako. Responden yang memiliki inisiatif ini menjelaskan bahwa setelah memenuhi kewajiban utama program, seperti membiayai pendidikan anak dan mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, mereka berusaha memanfaatkan sisa dana bantuan secara produktif. Penggunaan dana bantuan PKH sebagai tambahan modal ini juga mencerminkan adanya semangat kemandirian ekonomi di kalangan penerima manfaat.<sup>51</sup> Dengan demikian, program PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial untuk kebutuhan dasar, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya usaha ekonomi mikro di lingkungan masyarakat miskin.

### **Peran PKH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Poleonoro**

#### **a. Komunikasi Program**

Akses terhadap informasi mengenai (PKH) menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi kelancaran penerimaan bantuan dan partisipasi aktif dalam kegiatan program. Dari responden yang kami temui menyatakan 50% penerima manfaat menyatakan bahwa mereka menerima informasi terkait bantuan PKH melalui pesan WhatsApp. Komunikasi ini difasilitasi melalui grup WhatsApp yang secara langsung menghubungkan para penerima manfaat dengan pendamping PKH.<sup>52</sup> Informasi yang disampaikan dalam grup ini mencakup jadwal pencairan bantuan, undangan rapat, kewajiban program, serta pemberitahuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH. Responden yang tergabung dalam grup WhatsApp tersebut mengaku bahwa informasi yang diterima cukup jelas, cepat, dan memudahkan mereka dalam mengikuti kegiatan program sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian terdapat juga 50% keluarga penerima manfaat menyatakan tidak tergabung dalam grup WhatsApp tersebut. Mereka hanya memperoleh informasi melalui teman sesama penerima PKH karena tidak tergabung dalam grup resmi pendamping.<sup>53</sup> Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam penerimaan informasi, di mana beberapa informasi yang diterima menjadi kurang lengkap atau bahkan tidak tepat waktu.

Selain itu, ada pula kendala teknis yang dihadapi sebagian penerima, seperti buruknya jaringan internet di wilayah tempat tinggal mereka. Hal ini membuat mereka kesulitan menerima pesan atau pembaruan informasi yang dikirim secara daring, sehingga berpengaruh terhadap keikutsertaan mereka dalam kegiatan yang berkaitan dengan program PKH.<sup>54</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan program PKH masih belum menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Ketimpangan dalam akses informasi menyebabkan sebagian keluarga berisiko tertinggal dalam mengikuti kegiatan program atau bahkan tidak mengetahui perubahan penting yang berkaitan langsung dengan bantuan yang mereka terima. Hal ini juga berpengaruh pada efektivitas program secara keseluruhan, karena tidak semua peserta dapat menjalankan kewajiban mereka secara optimal jika informasi yang diterima tidak akurat atau terlambat.

Komunikasi program dalam pelaksanaan PKH sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Penggunaan media digital seperti WhatsApp terbukti efektif untuk sebagian besar peserta, namun tetap diperlukan strategi tambahan untuk memastikan seluruh penerima manfaat, termasuk mereka yang belum memiliki akses digital atau mengalami kendala jaringan, tetap mendapatkan informasi yang setara. Pendamping PKH diharapkan lebih aktif melakukan pendekatan langsung kepada peserta yang tidak tergabung dalam grup digital. Dengan penyampaian informasi yang merata dan tepat waktu, diharapkan penerima manfaat dapat menjalankan kewajiban program secara

maksimal, yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian tujuan program PKH secara keseluruhan.

b. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan (PKH) dirasakan memberikan dampak yang beragam bagi keluarga penerima manfaat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Dari responden yang kami temui sebanyak 12% menyatakan bahwa bantuan PKH yang diterima belum sepenuhnya mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Dana bantuan umumnya langsung habis digunakan untuk keperluan dapur, seperti membeli bahan makanan pokok, serta untuk kebutuhan pendidikan anak, seperti perlengkapan sekolah, uang saku, atau seragam.<sup>55</sup>

Karena jumlah bantuan yang diterima relatif kecil, keluarga tidak dapat mengalokasikannya untuk kebutuhan lain di luar dua hal tersebut. Bantuan lebih bersifat meringankan beban, bukan mencukupi seluruh pengeluaran rumah tangga.

Sebagian besar responden yang kami temui sebanyak 88% menyatakan bahwa bantuan PKH cukup membantu dalam meringankan sebagian pengeluaran keluarga, terutama dalam hal pendidikan anak dan kebutuhan pangan harian.<sup>56</sup> Bagi kelompok ini, kehadiran bantuan PKH sangat berarti, meskipun nilainya terbatas. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena setidaknya bantuan tersebut bisa menjaga kelangsungan pendidikan anak dan menambah kebutuhan dapur meskipun hanya dalam waktu terbatas.

Namun, ada pula responden yang menyatakan bahwa bantuan PKH belum memberikan perubahan berarti dalam kesejahteraan keluarganya. Menurut mereka, jumlah bantuan yang diterima terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga manfaat yang dirasakan masih sangat terbatas.

Secara umum, pelaksanaan program PKH telah berjalan sesuai dengan sasaran utama, yaitu memberikan dukungan langsung kepada keluarga kurang mampu dalam bentuk bantuan tunai bersyarat. Namun, berdasarkan hasil temuan di lapangan, dampak program ini terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga belum signifikan. Bantuan lebih berfungsi sebagai penopang sementara dalam memenuhi kebutuhan pokok, bukan sebagai instrumen perubahan ekonomi keluarga secara menyeluruh. Oleh karena itu, agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, diperlukan penguatan melalui program pelengkap, seperti pelatihan keterampilan, akses usaha produktif, atau kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan (PKH) secara umum telah berjalan sesuai dengan sasaran utamanya, yaitu memberikan bantuan tunai bersyarat untuk mendukung keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Sebagian besar penerima manfaat menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban program, seperti rutin membawa balita ke posyandu dan memprioritaskan dana bantuan untuk pendidikan anak serta kebutuhan pokok lainnya.

Namun demikian, bantuan sosial yang diberikan cenderung bersifat sementara dan belum menyentuh secara menyeluruh aspek ketahanan pangan maupun peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Penggunaan dana bantuan untuk perbaikan tempat tinggal atau peningkatan ekonomi keluarga masih menjadi prioritas sekunder, dilakukan hanya jika ada sisa dana.

Program ini juga menunjukkan potensi dalam mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi mikro, namun belum maksimal karena belum diiringi oleh pendampingan intensif, pelatihan keterampilan, atau akses terhadap usaha produktif. Komunikasi program melalui media digital seperti WhatsApp cukup efektif, namun belum menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata, terutama mereka yang tidak memiliki akses digital. Oleh karena itu, peran pendamping PKH sangat penting untuk memastikan pemerataan informasi dan keterlibatan peserta secara aktif.

Agar PKH dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, perlu ada penguatan melalui integrasi dengan program-program pendukung lainnya, seperti edukasi gizi, pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, pelatihan orang tua dalam mendidik anak, serta pemberdayaan ekonomi. Pendekatan yang lebih holistik dan integratif ini diharapkan mampu menjadikan PKH bukan hanya sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju keluarga yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.

### **Saran**

1. Peningkatan Jumlah dan Jangkauan Bantuan, Pemerintah perlu meninjau kembali besaran bantuan PKH agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil keluarga penerima. Selain itu, penting untuk memperluas cakupan penerima, agar seluruh anak dalam keluarga yang memenuhi syarat juga dapat menikmati manfaat program secara adil dan merata.
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana oleh Keluarga, Diperlukan program pendampingan atau pelatihan keterampilan keuangan sederhana bagi penerima PKH agar dana yang diterima tidak hanya habis untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk usaha kecil atau kebutuhan jangka panjang secara lebih produktif.
3. Integrasi PKH dengan Program Pemberdayaan Lainnya, Agar dampak PKH lebih maksimal, program ini sebaiknya terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat lain seperti pelatihan keterampilan kerja, edukasi gizi, dan pemberdayaan perempuan, sehingga penerima bisa lebih mandiri secara ekonomi.
4. Penguatan Sistem Komunikasi Program, Pemerintah daerah dan pendamping PKH disarankan untuk memastikan bahwa semua penerima masuk dalam grup komunikasi resmi dan mendapatkan informasi secara langsung. Di daerah dengan kendala jaringan, dibutuhkan pendekatan alternatif seperti kunjungan rumah atau sosialisasi berkala secara tatap muka.
5. Evaluasi Berkala dan Responsif terhadap Kondisi Lapangan, Diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas PKH dengan melibatkan partisipasi penerima manfaat secara langsung. Dengan begitu, perbaikan program bisa dilakukan secara adaptif sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia Adhnanayani, S.Psi., M.Si.. "Modul Penelitian 2(Kualitatif)." 2020. H. 3.
- Aminah, Siti. "Memahami Perilaku Miskin Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah: Upaya Dalam Menghadapi Persaingan." *Journal Pengembangan Masyarakat Islam.*, Vol. 12, No. 1, (2021);, h. 28-40.
- Astuti, Yuni, Dkk. "Persepsi Masyarakat Prasejahtera Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Distributif Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh)." *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 4, No.3, 2016.
- Azhari. "Peran Negara Melalui Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana." *Journal Publicuho.*, Vol. 6, No. 3, Agustus-Oktober 2023), h. 879.
- Beno, Jose, Adhi Prastistha Silen, Melda Yanti. "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan

- Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Pesero) Cabang Teluk Bayu)." *Jurnal Saintek Maritin.*, Vol. 22, No. 2, Maret 2022, h. 121.
- Dahlan, M.Yacob Surung. "Petani Padi Sawah Dan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa)." *Jurnal Agrisistem*, Juni 2012, Vol. 8, No. 1.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. "Kajian Program Keluarga Harapan." 2015.
- Fahrurrozi. "Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Penerima PKH di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat." 2022.
- Harapan, Mutiara. "Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan." 2022.
- Husna , Nurul. "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial." *Jurnal Al-Bayan.*, Vol. 20, No. 29, Januari-Juni 2014, h. 46.
- Jati, Dkk. "Pencapaian Indeks Keluarga Sehat Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) : Literature Riview." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan.* Vol. 12, No. 2, (2021) 229-235.
- Kontu, Dkk. "Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Picuan Kecamatan Motolongi Timur Kabupaten Minahasa Selatan." , Vol. VII, No. 107, 2021, h. 2.a
- Mahmud, Dkk. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Enrekang". *Jurnal Administrasi Publik.*, Vol. 6, No. 1, April 2020, h. 18.
- Mustaghfiro, Sikhah Inayatul, Mohammad Noviani Ardi. "Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung.*, 15 Agustus 2022, h. 470.
- Nugraheni, Ajeng Rizki. "Pembagian Kerja Dan Curah Waktu Kerja Wanita Dalam Rumah Tangga Petani Karet Di Desa Karang Agung Dan Sumber Mulya Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan." 2017, h. 44.
- Oktasilvia, Ade Wahyu. "Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Buruh Home Industri Kerupuk Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Di Dusun Punggul Desa Ngastemi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto." 2017.
- Pani ,Riza, Amru Musan. "Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Menurut Ekonomi Islam." *Journal Of Sharia And Law: Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Menurut Ekonomi Syariah.*, Vol.2, No. 4, Oktober 2023, h. 1129.
- Prasetyo, Donny, Irwansyah. "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial.*, Vol. 1, No. 1, Januari 2020, h. 64.
- Pratiwi , Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial.*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, h. 211.
- Putra, Chabib Wijaya Hendra Adi. "Implementasi Program Pagu Wilayah Kecamatan (PKH) Bidang Ekonomi." 2012.
- Qurotta, Yuliana, 'Ayun, Agus Ahmad Safei, dan Ali Azis. " Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.*, Vol. 6, No. 2, 2021, 167-186.
- Rachma, Maulida, Yusuf Hidayat, dan Laila Azkia. "Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin" 2022.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol.11, No. 1, Maret 2007, ; hal. 35-40.
- Ramadani, Nadilla Zahra danRamadani. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Education (Jurnal Pendidikan Indonesia).*, Vol. 9, No. 2, 2023, pp. 683-691.
- Ridhwan, Nurul Irtiah Fajriati, dan Nurida Isnaeni. "Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan

- Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Kecamatan Tungkal Ilir.)” In *Journal Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economic and Finance*, Vol. 1, No. 1, September-Desember 2020:, 43-50, h. 43.
- Rijali , Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah.*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, h. 84.
- Ristanto , Dwi. “Perancangan Poster Iklan Layanan Masyarakat: “Cegah Culture Shock Di Kota Salatiga, Perkuat Komunikasi Antar Budaya Mahasiswa UKSW Pendetang.” 2016.
- Riyadh, Ahmad, Aditya Prima Yudha Dwi. “Implementation Of The Family Hope Program: Towards Indonesian Family, Welfare: Implementasi Program Keluarga Harapan: Menuju Kesejahteraan Keluarga Indonesia.” *Indonesia journal Of Public Review.*, Vol. 25, No. 1, Januari 2024, H. 2.
- Sasnita. “Analisis Akses Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bentuk Sembako Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Provinsi Aceh.” 2022.
- Simamora, Dkk. “Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup BAB IV Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah.” *Jurnal Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 01, No. 01, Juni 2020 (82-88).
- Suradi. “Pembangunan Manusia, Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.*, Vol. 12, No. 03, 2007, h. 1, (1-11).
- Talumesang, Dkk. “Program PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sanghie”. *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 2-3.
- Tejokusumo, Bambang. “Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial.” *Geoedukasi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2014, h. 39.
- Utomo, Dedy, Abdul Hakim, Heru Ribawanto. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP).*, Vol. 2, No. 1, Hal. 29-34, h. 29.
- Wilandari, Dkk. “Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Fuzzy K- Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013.” *Jurnal Gaussian*, Vol. 3, No. 4, Tahun 2014, h. 645-653.
- Witono , Toton. “Pembangunan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Dan Pekerjaan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial.*, Vol. 16, No. 1, Januari-Juni 2020, h. 62.
- Yare, Mince. “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.” *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*”.